

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022

RINGKASAN BERITA HARI INI



PARIWARA KEGLANTAN DPRD SIDOARJO

Bakal Dihapus, Komisi A Sarankan Angkat Honorer Jadi PPPK

KOTA Madiun, 14 September 2022. Komisi A DPRD Sidoarjo mengusulkan agar 100 orang honorer yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggantikan 100 orang honorer yang akan dihapus. Komisi A DPRD Sidoarjo mengusulkan agar 100 orang honorer yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggantikan 100 orang honorer yang akan dihapus. Komisi A DPRD Sidoarjo mengusulkan agar 100 orang honorer yang diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggantikan 100 orang honorer yang akan dihapus.

DPRD Sidoarjo Minta Semua Keluarga Harus Tahu Informasi Bahaya Narkoba

Sidoarjo, Bhirawa

Anggota Komisi D DPRD Kab Sidoarjo, Aditya Nindiyatman, mengatakan jangan sampai ada satu keluarga pun di Kab Sidoarjo, kedepannya yang tidak tahu informasi akan dampak bahaya penyalahgunaan Narkoba. Apa yang ia katakan itu, menurutnya semata-mata sebagai suatu ide inspiratif, dalam upaya pencegahan promotif dan preventif, akan bahaya Narkoba di Kab Sidoarjo. "Karena jangan sampai Sidoarjo ini menjadi wilayah yang masuk dalam kondisi darurat Narkoba," kata Aditya, belum lama ini. Dari data yang ia peroleh, Provinsi Jawa Timur, saat ini masuk dalam ranking kedua terbesar dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Ranking pertama oleh Sumatera Utara. Ia prihatin, kondisi Jawa Timur, sampai melebihi DKI Jakarta. Dirinya mengatakan di zaman modern saat ini penyalahgunaan Narkoba bisa dilewatkan berbagai cara. Tidak hanya cara konvensional saja, tetapi juga dengan cara-cara lain, seiring dengan perkembangan teknologi informasi. "Kembali lagi, keluarga di Sidoarjo, semuanya harus tahu informasi akan bahaya Narkoba. Secara bertahap, semua keluarga harus dan wajib untuk tahu. Semoga ini bisa mencegah. Masalah SDM harus kita benahi," kata Aditya serius.

10 Warga Binaan Lapas Sidoarjo Jadi Kader Kesehatan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Sebanyak sepuluh warga binaan Lapas II A Sidoarjo dilatih menjadi kader kesehatan Rabu (14/9). Mereka akan dibina dan diawasi agar menjadi agen kesehatan di lapas yang dipimpin Teguh Pamuji itu. Kegiatan ini sebagai tonggak awal sebelum mereka benar-benar diterjunkan untuk membantu tim kesehatan lapas yang terletak di jantung Kota Lidang itu. Lima orang tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat memberikan pelatihan dan pendampingan teknis. "Mereka ini akan diseleksi, sebelumnya kami melihat latar belakang dan keahlian yang dimiliki, sehingga bukan sembarang warga binaan bisa mendapat kesempatan menjadi kader kesehatan," cetus Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeeroji. Zaeeroji menjelaskan kegiatan ini merupakan implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lapas, petugas kesehatan dibantu oleh tamping kesehatan. Mereka dipilih oleh petugas serta bekerja secara sukarela untuk membantu peningkatan derajat kesehatan di lapas. "Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di lapas, warga binaan dapat diangkat menjadi tamping, tentunya dengan kriteria dan syarat tertentu," terangnya. Sementara itu, Kalapas Sidoarjo Teguh Pamuji menjelaskan bahwa para tamping yang terpilih setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi. Dia berharap para warga binaan semakin mau ingin mengikuti kegiatan pemilihan kader kesehatan ini. "Kesempatan menjadi tamping ini banyak keuntungannya. Salah satunya berpeluang mendapatkan remisi lebih besar dari warga binaan lain karena dianggap telah berjasa membantu negara dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan lain," jelas Teguh. Teguh juga menjelaskan bahwa tamping kesehatan itu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu tamping klinik dan kader kesehatan. Tamping klinik adalah akan membantu petugas kesehatan di klinik atau poliklinik lapas. Sedangkan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan petugas kesehatan untuk memberikan motivasi dan penyempurnaan informasi dalam menjaga kesehatan. "Tamping klinik nanti lebih banyak berada di klinik lapas, sedangkan kader kesehatan lebih sering berada di blok umum untuk melakukan penyuluhan kesehatan," pungkasnya. (ca/rd)

Mampu Produksi 15 Ton Kerjasama Pemkab Sidoarjo dan PJB Kelola Sampah Dikawal KPK

dalam mengawal kerjasama pengelolaan sampah yang ditandatangani Pemda dan PT PJB. Keperingatannya kata Pahlala Nainggolan, yang menilai usaha yang Pemda agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan sampah. "Prinsipnya kami mendukung pelaksanaan MoU antara Pemkab Sidoarjo dan PT PJB," ujar Pahlala Nainggolan berpidato Selasa (13/9/2022). Menurut Pahlala, secara perhitungan kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak. Pemda jember tidak perlu mengeluarkan APBD untuk mengatasi masalah sampah. "Karena sampah yang ada sekarang bisa diolah dijadikan campuran bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kemudian dijual ke PT PJB. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT PJB bisa efisien pembelian bahan bakar," tambahnya. Pahlala juga menjelaskan, kerjasama ini harus dipahami Pemda tujuannya bukan untuk mencairkan pendapatan, akan tetapi masalah sampah di Jember. "Pahlala juga menjelaskan, kerjasama ini harus dipahami Pemda tujuannya bukan untuk mencairkan pendapatan, akan tetapi masalah sampah di Jember. "Pahlala juga menjelaskan, kerjasama ini harus dipahami Pemda tujuannya bukan untuk mencairkan pendapatan, akan tetapi masalah sampah di Jember."

Disampainya, kasus penyalahgunaan Narkoba dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Data dari Polresta Sidoarjo, pada tahun 2020 terakumulasi ada 429 kasus dengan 494 tersangkanya. Sementara pada tahun 2021, ada 531 kasus dengan 624 tersangkanya. [kusi.dre]



BANTUAN: Kades Grabagan, Kamadi, SE, (kanan) mendampingi warganya menerima BLT. (par)

UMKM Warga Desa Grabagan Terima BLT BBM dan BPNT

Sidoarjo, 14 September 2022. Sebanyak 361 warga kurang mampu Desa Grabagan Kecamatan Tulangan cukup bernafas langgar di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pahlanya mereka menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari kenaikan harga BBM dan BLT dari BPNT (bantuan pangan non tunai). Bantuan dari pemerintah pusat itu diteruskan di Balai Desa Gabagan, Rabu (14/9/2022). Dana segar yang diterima setiap warga sebesar Rp 500 ribu dengan rincian Rp 300 ribu dari BBM untuk dua bulan dan Rp 200 ribu dari BPNT. Kepala Desa Grabagan, Kamadi, SE, yakin bahwa penerima bantuan tersebut sudah tepat sasaran karena mereka sudah pada data dari pusat. "Saya percaya para penerima BLT ini tepat sasaran, data yang turun pasti telah diverifikasi sehingga tidak ada kecemburuan di masyarakat," jelasnya. Melengkapi harapannya, Kades berpesan agar bantuan dana yang diterima dijadikan penguat modal usaha sehingga dengan banyaknya barang dengan harga naik, warga tetap dapat berbelanja untuk usaha tanpa mengurangi persorinya. "Dana itu jangan untuk belanja yang lain, selain untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan atau usahanya, sehingga warga tetap dapat berjalan atau menjalankan usaha sesuai dengan persorinya. Juga membantu perekonomian warga lain dengan profesi yang berbeda," harap kades. Di tempat lain, tercermin aharah cerah di wajah ibu Sumini usai menerima BLT. Ibu penjual kue gorengan itu merasa akan terbantu dengan dana segar itu. "Uang ini untuk tambahan modal, harga minyak goreng dan bahan lain sedikit naik. Dengan modal tambahan



CARI ILMU: Tim dari Pemkab Klungkung dan Kabupaten Jemberna, Bali, melihat pemilahan dan pengolahan sampah di TPA Jabon.

Kabupaten Klungkung Studi Banding Sampah di Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA. Inovasi pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) Jabon, Kabupaten Sidoarjo menarik bagi sejumlah pemerhati daerah untuk meniru. Di antaranya adalah bagi Pemkab Klungkung dan Jemberna Bali. Rabu (14/9) sejumlah pejabat dari dua kabupaten di Bali itu juga telah berkunjung ke TPA Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Mereka datang untuk menyaksikan langsung proses pengolahan sampah-sampah di TPA. Termasuk mempelajari mesin beserta spesifikasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudaryana mengungkapkan, ia sengaja datang jauh-jauh dari Bali karena keingintahannya ingin mempelajari inovasi pengolahan sampah. "Ada relevansi teknologi. Residu yang dihasilkan tidak bisa di olah, tapi di sintesis bisa," jelasnya. Ia menambahkan, sebelum ke Sidoarjo, pihaknya telah banyak mendapat informasi dari media dan kiriman video terkait pengolahan sampah di Sidoarjo. Karena itu ia bersama pejabat lain penarsan untuk menyaksikan langsung. "Kami akan amati, turu, dan modifikasi (ATM) di Bali," terangnya. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha dan Usahawan Baku untuk Pemda Kabupaten Klungkung, Ivan menambahkan, pengolahan sampah di Sidoarjo sudah cukup terkenal di antara sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, ia berterima kasih bisa melihat langsung proses dan mesin yang digunakan di TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo. Masalah sampah di Jemberna maupun Klungkung juga termasuk isu klasik yang butuh penyelesaian. Kalau dari jumlah memang tidak sebanyak di Sidoarjo. Volume sampah harian di Klungkung ada di angka 90 ton, sementara di Jemberna di angka sekitar 168 ton. Kegiatan masyarakat dan jumlah penduduk jadi salah satu faktor yang membedakan besaran volume sampah. (ca/rd)

Dua Kabupaten di Bali Kepincut Pengolahan Sampah Sidoarjo

SIDOARJO - Proses pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon jadi daya tarik bagi daerah lain. Kemarin (14/9) tim dari Pemkab Klungkung dan Jemberna, Provinsi Bali, datang langsung ke TPA Jabon untuk mengadopsi cara pengolahan sampah. Antara lain terkait proses pemilahan sekaligus cara pengolahan sampah. Mencakup spesifikasi mesin pencacah sampah, mesin pengolah sampah, dan mesin produksi bahan bakar jumpatan padat (BBJP). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudaryana menyebut, selama ini masalah pengolahan sampah juga jadi perhatian di kabupatennya. Pihaknya kerap kali berkunjung ke daerah lain untuk bisa mengadopsi cara pengolahan sampah. Ketika menemukan informasi terkait inovasi penuntasan di Sidoarjo, pihaknya tertarik. Selama ini, inovasi tersebut hanya dia baca dan lihat dari media sosial dan media massa. "Saya tertarik untuk datang langsung, kami ingin terapkan juga di Bali," katanya. Apalagi, Sidoarjo juga berhasil bekerja sama dengan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Sidoarjo sebagai pemasok BBJP sebagai bahan bakar tambahan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PJB. "Jadi, saya tertarik, padahal jumlah sampah Sidoarjo lebih banyak," jelasnya. Dilihat dari jumlahnya, memang sampah di Kabupaten Klungkung dan Jemberna tidak sebanyak sampah di Sidoarjo. Sampah di Klungkung hanya 90 ton per hari, sedangkan di Jemberna sekitar 168 ton per hari. (uzi/c17/any)

KPK Kawal Kerjasama Pemkab dengan PJB Kelola Sampah

SIDOARJO - Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Bakalor Jumpatan Padat untuk Co Firing PLTU dikepalai Bupati Sidoarjo Ahmad Mulhord dan Direktur Operasi 2 PT. PJB Rachmanoe Indarto di Kantor Pusat PT. PJB, Ketintang Surabaya. Penandatanganan MoU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudaryana (pakaian putih) berkunjung ke TPA Jabon. Ia menambahkan, sebelum ke Sidoarjo, pihaknya telah banyak mendapat informasi dari media dan kiriman video terkait pengolahan sampah di Sidoarjo. Karena itu ia bersama pejabat lain penarsan untuk menyaksikan langsung. "Kami akan amati, turu, dan modifikasi (ATM) di Bali," terangnya. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha dan Usahawan Baku untuk Pemda Kabupaten Klungkung, Ivan menambahkan, pengolahan sampah di Sidoarjo sudah cukup terkenal di antara sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, ia berterima kasih bisa melihat langsung proses dan mesin yang digunakan di TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo. Masalah sampah di Jemberna maupun Klungkung juga termasuk isu klasik yang butuh penyelesaian. Kalau dari jumlah memang tidak sebanyak di Sidoarjo. Volume sampah harian di Klungkung ada di angka 90 ton, sementara di Jemberna di angka sekitar 168 ton. Kegiatan masyarakat dan jumlah penduduk jadi salah satu faktor yang membedakan besaran volume sampah. (ca/rd)

Penanganan sampah yang ada di TPA Jabon bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi jumpatan padat.

Prinsipnya kami siap mendukung secara regulasi dan kebijakan, kita juga sedang menyiapkan BLU TPA Jabon, untuk kapasitas produksi nanti kita upayakan naik lagi, sekarang kemampuan produksi 15 ton per hari," ujarnya. Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan mengungkapkan, kebutuhan jumpatan padat untuk co firing perhari 100 ton. Ia berharap kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dari sampah olahah Pemkab Sidoarjo, Pemkab Tuban, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Tuban. Selanjutnya, jumpatan padat yang dihasilkan TPA Jabon sudah diuji cobakan di PLTU Awar-Awar dan PLTU Patton sebanyak 60 ton. Hasil dari uji coba itu secara umum sudah layak untuk dijadikan campuran bahan bakar batu bara atau co firing. "PJB bersama Pemkab Sidoarjo mengirim 60 ton untuk uji coba di PLTU Awar-Awar dan PLTU Patton. Kebutuhan maksimum 3 persen pemanfaatan sampah olahan," terangnya. (yud)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



PARIWARA KEGIATAN DPRD SIDOARJO



Bakal Dihapus, Komisi A Sarankan Angkat Honorer Jadi PPPK

KOTA-Adanya peraturan baru dari pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga honorer pada 2023 menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. Termasuk kalangan legislatif.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Wanh Andono berharap ada langkah yang dilakukan Pemkab Sidoarjo terkait nasib para tenaga honorer tersebut. Misalnya dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut dia, para tenaga honorer tersebut membutuhkan bantuan Pemkab. Sebab sebagian besar terhambat usia untuk bisa mengikuti tes CPNS. "Usianya sudah tidak memenuhi syarat," katanya.

Dia pun berharap ada kebijakan terkait pengangkatan honorer itu menjadi PPPK. Bahkan jika memungkinkan, pengangkatannya tidak melalui proses seleksi.

Mengenai jumlah tenaga honorer yang ada di Sidoarjo, politikus Golkar itu masih menunggu data dari Pemkab. Sebab dalam waktu dekat Komisi A bakal menggelar hearing saat data itu sudah disetorkan ke komisi. "Nanti kami rundingkan bersama, langkah apa yang harus dilakukan agar para tenaga honorer ini bisa mendapat solusi yang baik," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan honorer dianggap krusial. Sebab rencananya diterapkan pada 2023. Artinya hanya ada beberapa bu-

lan dalam mencari solusi. Apalagi saat ini sedang dalam pembahasan APBD 2023.

Selama ini, kata dia, pembayaran gaji honorer tidak mengganggu keuangan Pemkab. Jika honorer dihapuskan, dia khawatir akan memunculkan masalah sosial. "Kita harap rencana penghapusan honorer ini dikaji ulang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menghargakan kebijakan pemerintah nantinya tidak membuat pemutusan hubungan kerja terjadi pada ribuan tenaga honorer di Kota Delta.

Tahun depan status pegawai hanya ada ASN dan P3K. Tidak ada honorer, tetapi ada outsourcing. Dia berharap tidak ada



Dhamroni Chudlori
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo



Tarkit Erdianto
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo



Wanh Andono
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo

pemutusan hubungan kerja apabila kebijakan tersebut diterapkan. "Jika honorer tidak dapat jadi P3K, mungkin bisa di-outsourcing, intinya jangan sampai

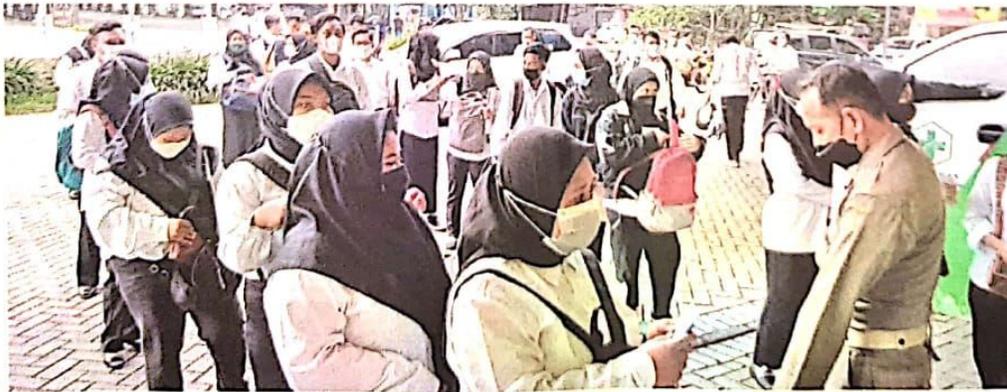
ada pemutusan kerja," katanya. Hal itu dilakukan agar honorer yang bekerja sehari-hari di lingkungan Pemkab Sidoarjo masih dapat tetap bekerja. Namun

dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.

Anggota Komisi A DPRD Tarkit Erdianto mengatakan, apabila hubungan kerja honorer diputus, dikhawatirkan akan membuat masalah baru. Yakni meningkatkan angka pengangguran di Sidoarjo akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Bukan hanya ribuan tenaga honorer itu saja, sebab anak istrinya juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena pengangguran meningkat, maka angka kemiskinan juga meningkat. "Jadi kami di DPRD akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan honorer, bakal kami cari bersama solusinya," imbuhnya.

Dia menegaskan, menolak terkait rencana penghapusan tenaga honorer di pemerintah daerah bukan tanpa alasan. Tetapi menilai masih dibutuhkan tenaga honorer untuk membantu kinerja pemerintah. (nls/vga)



AKAN DITADAKAN: Perekrutan pegawai honorer untuk RSUD Sidoarjo Barat beberapa waktu lalu.

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Minta Semua Keluarga Harus Tahu Informasi Bahaya Narkoba

Sidoarjo, Bhirawa

Anggota Komisi D DPRD Kab Sidoarjo, Aditya Nindyatman, mengatakan jangan sampai ada satu keluarga pun di Kab Sidoarjo, kedepannya yang tidak tahu informasi akan dampak bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Apa yang ia katakan itu, menurutnya semata-mata sebagai suatu ide inspiratif, dalam upaya pencegahan promotif dan preventif, akan bahaya Narkoba di Kab Sidoarjo.

“Karena jangan sampai Sidoarjo ini menjadi wilayah yang masuk dalam kondisi darurat Narkoba,” kata Aditya, belum lama ini. Dari data yang ia peroleh, Provinsi Jawa Timur, saat ini masuk dalam rangking kedua terbesar dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Rangking pertama oleh Sumatera Utara. Ia prihatin, kondisi Jawa Timur, sampai melebihi DKI Jakarta.

Dirinya mengatakan di zaman modern saat ini penyalahgunaan Narkoba bisa dilewatkan berbagai cara. Tidak hanya cara konvensional saja, tetapi juga dengan cara-cara lain, seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

“Kembali lagi, keluarga di Sidoarjo, semuanya harus tahu informasi akan bahaya Narkoba. Secara bertahap, semua keluarga harus dan wajib untuk tahu. Semoga ini bisa mencegah. Masalah SDM harus kita benahi,” kata Aditya serius.

Disampaikannya, kasus penyalahgunaan Narkoba dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Data dari Polresta Sidoarjo, pada tahun 2020 terakumulasi ada 429 kasus dengan 494 tersangkanya. Sementara pada tahun 2021, ada 531 kasus dengan 624 tersangkanya. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Cegah Pemborosan dan Penyimpangan

KPK Kawal Kerjasama Pemkab dengan PJB Kelola Sampah

SIDOARJO-Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Bahan Bakar Jumpatan Padat untuk Co Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap diteken Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Direktur Operasi 2 PT. PJB Rachmanoe Indarto di Kantor Pusat PT. PJB, Ketintang Surabaya.

Penandatanganan MoU disaksikan Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan, Komisaris Independen PT. PLN Persero, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Mega Proyek Energi Terbarukan PT. PLN Persero William Kusdiharto, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Deputi KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, institusinya memiliki kepentingan dalam mengawal kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemda dan PT. PJB. Kepentingannya kata Pahala Nainggolan, yaitu menjaga uang pemda agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan sampah.

Ia mendukung pelaksanaan MoU antara Pemkab Sidoarjo



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menandatangani MoU dengan Direktur Operasi 2 PT. PJB Rachmanoe Indarto di Kantor Pusat PT. PJB, Ketintang Surabaya.

dengan PT. PJB. Menurut Pahala, secara perhitungan kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Pemda bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan APBD untuk mengatasi masalah sampahnya. Karena sampah yang ada sekarang bisa diolah dijadikan campuran bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kemudian dijual ke PT. PJB. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT. PJB bisa efisiensi pembelian bahan bakar batu bara.

Pahala juga menjelaskan, kerjasama tersebut harus dipahami

Pemda bahwa tujuannya bukan untuk mencari pendapatan, tetapi problem sampah bisa terselesaikan dengan ramah lingkungan.

"Tujuan utama tidak mencari pendapatan tetapi menyelesaikan masalah sampah di daerah," ujar Pahala.

KPK juga tengah mengajukan perubahan Perpres Nomor 35 tahun 2018 tentang pemanfaatan sampah yang diubah menjadi energi listrik. Menurut Nainggolan, perpres tersebut sekarang dalam proses perubahan dan sudah diajukan KPK ke Presiden Joko Widodo. Perubahannya

yakni, pemanfaatan sampah diolah terlebih dulu menjadi energi terbarukan selanjutnya bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai energi listrik. Salah satunya bisa untuk co firing PLTU yang dilakukan PT. PJB sekarang.

"Saya harap setelah MoU ini segera dilanjutkan ketingkat selanjutnya, jangan sampai berhenti di MoU saja. Kewajiban pemda menyiapkan lahan dan mengolah sampah menjadi RDF kemudian dimanfaatkan PJB untuk bahan bakar PLTU," tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan, pada prinsipnya Pemkab Sidoarjo setuju sepenuhnya kerjasama pengolahan sampah dengan PT. PJB.

Ia juga menyampaikan, kapasitas pengolahan sampah di TPA Jabon yang memiliki luas 14 hektar saat ini perhari mampu memproduksi 15 ton jumputan padat atau RDF.

Gus Muhdlor berharap kerjasama segera bisa dilakukan setelah penandatanganan MoU, karena saat ini ia sedang menyiapkan BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) yang mengelola sampah di TPA Jabon. Upaya itu dilakukan agar proses kerjasama dan

penanganan sampah yang ada di TPA Jabon bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi jumputan padat.

"Prinsipnya kami siap mendukung secara regulasi dan kebijakan, kita juga sedang menyiapkan BLUD TPA Jabon, untuk kapasitas produksi nanti kita upayakan naik lagi, sekarang kemampuan produksi 15 ton perhari," ujarnya.

Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan mengungkapkan, kebutuhan jumputan padat untuk co firing perhari 100 ton. Ia berharap kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dari sampah olahan Pemkab Sidoarjo, Pemkab Tuban, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Tuban.

Sebelumnya, jumputan padat yang dihasilkan TPA Jabon sudah diuji cobakan di PLTU Awar-Awar dan PLTU Paiton sebanyak 60 ton. Hasil dari ujicoba itu secara umum sudah layak untuk dijadikan campuran bahan bakar batu bara atau ci firing.

"PJB bersama Pemkab Sidoarjo mengirim 60 ton untuk ujicoba di PLTU awar-awar dan Paiton. Kebutuhan maksimum 3 persen pemanfaatan sampah olahan," terangnya. ● yud

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Bersinergi dengan USAID Bangun Layanan Publik



ahmad suprayogi/
bhirawa
Asisten Asisten
Administrasi
Umum
Setdakab
Sidoarjo saat
membuka
Lokakaryanya.

Sidoarjo, Bhirawa

Pemkab Sidoarjo terus berbenah dalam menata dan meningkatkan pelayanan publiknya. Hal itu dilakukan

karena Pemkab Sidoarjo komitmen menjaga dan meningkatkan pelayanan publik yang prima. Salah satunya dengan menggelar Lokakarya Pen-

ingkatan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dengan program USAID (United States Agency for International Development).

Lokakarya digelar selama dua hari mulai tanggal 13-14 September 2022 dengan peserta 105 ASN perwakilan OPD, kecamatan, kelurahan, Puskesmas serta RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat, dan dilakukan di sebuah hotel di Malang. Kegiatan tersebut diinisiasi Pemkab Sidoarjo lewat Bagian Organisasi itu mengajak sinergi organisasi internasional Amerika USAID lewat programnya, USAID Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat, atau yang disingkat USAID ERAT. Lokakarya peningkatan kinerja pel-

ayanan publik melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut dibuka Asisten Administrasi Umum Setdakab Sidoarjo Drs. Ahmad Zaini MM.

Menurut Ahmad Zaini, pelayanan publik di Pemkab Sidoarjo secara umum baik dan sudah diakui pemerintah pusat. Namun ia minta itu tidak menjadikan ASN berpuas diri. Pelayanan publik yang prima harus selalu dihadirkan kepada masyarakat. "Pelayanan publik di Sidoarjo sudah bagus, sudah prima tapi kita harus terus berinovasi, kita tidak boleh berpuas diri dengan capaian ini," pintanya.

Ahmad Zaini berharap inovasi-inovasi pelayanan publik ditelurkan para ASN dengan produktif. Dengan terus mengembangkan inovasi, ia yakin standar pelayanan publik di Sidoarjo semakin meningkat. Standar pelayanan publik prima yang diminta Kemenpan RB serta pelayanan publik menuju zona hijau, seperti yang diharapkan Ombudsman untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Carilah inovasi lain agar pelayanan publik kita semakin meningkat, harus ada lompatan dari kabupaten lain, gali pengalaman dari kabupaten lain, dan harus selalu ada penyesuaian terhadap pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat," ujarnya. [ach]

HARIAN
Bhirawa
Wala Dikong Bhiru Yekidat



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Wanita Bisa Jaga Martabatnya

SIDOARJO - Kuatkan iman dan Taqwa Kepada Allah SWT, Rumahku Surgaku menjadi tema yang diangkat dalam pengajian rutin yang diselenggarakan oleh TP.PKK Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Pengajian rutin yang dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj.Sa'adah Ahmad Muhdlor, S.Hum bersama jajaran pengurus TP.PKK Kab.Sidoarjo tersebut mengundang Ibu Nyai Khusnul Khuluq sebagai penceramah.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor mengatakan tema Rumahku Surgaku sengaja disuguhkan dalam pengajian kali ini. Pasalnya ia yakin apa yang menjadi tema tersebut pasti didambakan semua keluarga. Keluarga yang mendambakan rasa bahagia, aman, nyaman. Menurutnya untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga seperti itu dibutuhkan pondasi dasar rumah tangga bahagia. Salah satu caranya dengan saling memberikan kenyamanan, cinta dan kasih sayang yang di dasarkan pada agama.

Ketua TP PKK Sidoarjo yang akrab dipanggil Ning Sasha itu menyampaikan bahwa Rumahku Surgaku dalam lingkup yang general bisa juga bermakna Sidoarjo sebagai rumah bersama. Masyarakat memiliki peran penting untuk mewujudkan Sidoarjo makin berkembang. Peran wanita atau ibu-ibu mewujudkan itu sangat dibutuhkan. Seorang ibu bisa menentukan apakah rumahnya itu bisa menjadi surga karena Ibu adalah seorang penyejuk di dalam rumah.

"Intinya di sini adalah wanita memang memiliki peran penting dalam segala aspek bukan hanya bagi rumahnya sendiri namun juga dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana seorang wanita bisa betul-betul menjaga harkat dan martabatnya, sebagai wanita yang harus bisa betul-betul menjunjung harga dirinya dan nilai-nilai Islam selain itu juga harus bisa menjadi wanita yang tidak hanya menyenangkan bagi keluarga tapi juga bisa memberikan manfaat bagi semuanya," kata Ning Sasha

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nyai Khusnul Khuluq bahwa kunci utama surga dalam keluarga adalah Istri yang bisa memberikan kesejukan bagi suami dan anak-anaknya. Ibu dimintanya harus mampu menjaga dan menjunjung martabat keluarga dengan tidak mudah goyah dan patuh pada suami. ●loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Mampu Produksi 15 Ton

Kerjasama Pemkab Sidoarjo dan PJB Kelola Sampah Dikawal KPK



KERJASAMA - Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah jadi Bahan Bakar Jumpatan Padat untuk Co Firing PLTU diteken Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Direktur Operasi 2 PT PJB Rachmanoe Indarto di Kantor Pusat PT PJB Surabaya, Selasa (13/09/2022).

Sidoarjo, Memo X

Nota Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Bahan Bakar Jumpatan Padat untuk Co Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diteken Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Direktur Operasi 2 PT PJB Rachmanoe Indarto di Kantor Pusat PT PJB, Ketintang, Surabaya, Selasa (13/09/2022).

Penandatanganan MoU di-

saksikan Direktur Utama PT PJB Gong Matua Hasibuan, Komisaris Independen PT PLN Persero, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Mega Proyek Energi Terbarukan PT PLN Persero William Kusdiharto, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan institusinya memiliki kepentingan

dalam mengawal kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan Pemda dan PT PJB. Kepentingannya kata Pahala Nainggolan, yakni menjaga uang Pemda agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan sampah.

"Prinsipnya kami mendukung pelaksanaan MoU antara Pemkab Sidoarjo dan PT PJB," ujar Pahala Nainggolan kepada Memo X, Selasa (13/09/2022).

Menurut Pahala, secara perhitungan kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak. Pemda bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan APBD untuk mengatasi masalah sampahnya.

"Karena sampah yang ada sekarang bisa diolah dijadikan campuran bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kemudian dijual ke PT PJB. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT PJB bisa efisiensi pembelian bahan bakar batu bara," imbuhnya.

Pahala juga menjelaskan, kerjasama ini harus dipahami Pemda tujuannya bukan untuk mencari pendapatan. Akan tetapi problem sampah bisa terselesaikan dengan ramah lingkungan sekaligus tidak diprotes warga karena bau sampah. "Tujuan utama tidak mencari pendapatan, tetapi menyelesaikan masalah sampah di daerah masing-mas-

ing," tegasnya.

KPK juga tengah mengajukan perubahan Perpres Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sampah yang diubah menjadi Energi Listrik. Menurutnya, perpres ini sekarang dalam proses perubahan dan sudah diajukan KPK ke Presiden RI, Joko Widodo. Perubahannya yakni pemanfaatan sampah diolah terlebih dulu menjadi energi terbarukan.

"Selanjutnya, bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai energi listrik. Salah satunya bisa untuk co firing PLTU yang dilakukan PT PJB sekarang. Saya berharap setelah MoU ini segera dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Jangan sampai berhenti di MoU saja. Kewajiban Pemda menyiapkan lahan dan mengolah sampah menjadi RDF dan kemudian dimanfaatkan PJB untuk bahan bakar PLTU," paparnya.

Sementara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengungkapkan pada prinsipnya Pemkab Sidoarjo setuju sepenuhnya kerjasama pengelolaan sampah dengan PT PJB. Pihaknya menyampaikan kapasitas pengolahan sampah di TPA Jabon yang memiliki luas 14 hektar saat ini perhari mampu memproduksi 15 ton jumpatan padat (RDF). (wan/dar)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Klungkung dan Jembrana Kepincut Pengolahan Sampah TPA Jabon

JABON-Inovasi pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah. Di antaranya adalah Pemkab Klungkung dan Jembrana, Bali.

Rabu (14/9) sejumlah pejabat dari dua kabupaten itu juga telah berkunjung ke TPA Jabon. Mereka datang untuk menyaksikan langsung proses pengolahan sampah-sampah di TPA. Termasuk mempelajari mesin beserta spesifikasinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Ketut Suadnyana mengungkapkan, ia datang jauh-jauh dari Bali karena kepincut dengan inovasi pengolahan sampah. "Ada rekayasa tek-



DIMANFAATKAN: Pekerja di TPA Jabon sedang mengolah sampah jadi briket.

nologi. Residu yang biasanya tidak bisa diolah, tapi di sini (Sidoarjo, red) bisa," katanya.

Dia menambahkan, sebelum ke Sidoarjo, pihaknya telah banyak mendapat informasi dari media dan kiriman video terkait pengolahan sampah di Kota Delta. Karena itu ia bersama pejabat lain penasaran untuk menyaksikan langsung. "Kami akan ATM, Amati Tiru dan Modifikasi di Bali," imbuhnya.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia dan Founder Bali Waste Cycle, Putu Ivan Yunatana yang ikut mendampingi rombongan menambahkan, sebagai stakeholder yang bekerjasama dengan Pemkab Jembrana, ia juga tertarik dengan penggunaan teknologi di TPA Jabon.

"Replika yang ada di Sidoarjo akan kami bawa ke Klungkung," tuturnya.

Ivan menambahkan, pengolahan sampah di Sidoarjo sudah cukup terkenal di antara sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu ia berterima kasih bisa melihat langsung proses dan mesin yang digunakan di TPA Jabon.

Dia mengakui, masalah sampah di Jembrana maupun Klungkung termasuk isu klasik yang butuh penyelesaian. Kalau dari jumlah memang tidak sebanyak di Sidoarjo. Volume sampah harian di Klungkung ada di angka 90 ton, sementara di Jembrana di angka sekitar 168 ton. "Kegiatan masyarakat dan jumlah penduduk jadi salah satu faktor yang membedakan besaran volume sampah," pungkasnya. (son/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Proses Perbaikan 19 Sekolah Rusak Sesuai dengan Jadwal

Optimistis Desember Tuntas Seluruhnya

SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tahun ini memperbaiki 19 sekolah. Perbaikan saat ini masih berlangsung dan dinilai sesuai jadwal. Karena itu, Desember mendatang perbaikan ditargetkan tuntas semuanya.

Perbaikan berfokus pada kondisi bangunan yang rusak atau yang butuh ditinggikan karena rawan banjir. Artinya, bukan pembangunan ruang kelas baru (RKB). "Untuk tahun ini hanya perbaikan, belum ada penambahan RKB," jelas Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi.

Sekolah yang diperbaiki tersebar. Anggaran perbaikan juga berbeda sesuai dengan tingkat kerusakan di sekolah. Sejumlah sekolah yang diperbaiki tersebut, antara lain, SD Bangsri di Kecamatan Sukodono. Perbaikan dilakukan di lima kelas yang ada di sana.

Fokus utama adalah peninggian bangunan dan perbaikan atap yang mulai kerosok dan rawan roboh. Anggaran untuk perbaikan sekolah tersebut mencapai Rp 801 juta. Di sekolah lain, berbeda yang diperbaiki. Misalnya, SDN Lemahputro 3, Kecamatan Sidoarjo. Selain perbaikan bangunan, dinas dikbud juga membangun paving di halaman SD tersebut. Total anggaran perbaikan di sana mencapai Rp 1,1 miliar.

Anggaran perbaikan pada 19 sekolah

tersebut berkisar mulai Rp 200 juta hingga Rp 1,2 miliar, bergantung pada tingkat kerusakan dan kebutuhan perbaikan. Tirto menjelaskan, proses lelang perbaikan sekolah tersebut rata-rata tuntas Juli lalu. Sebagian besar penandatanganan kontrak juga dilakukan pada akhir Juli lalu.

Setelah itu, pekerjaan perbaikan sekolah rata-rata dimulai pada awal Agustus lalu. "Karena itu, sekarang masih dikerjakan semuanya. Belum ada yang selesai. Namun, progresnya sudah baik. Tidak ada keterlambatan. Paling cepat November ada yang sudah selesai. Jadi, kami optimistis Desember bisa tuntas semuanya," jelas Tirto.

Pada masa pengerjaan ini, pihaknya juga melakukan pengecekan rutin

sekali-gus menugasi pengawas untuk meninjau rutin jalannya perbaikan. "Kalau sampai Desember ada yang tidak selesai, ya pelaksana proyeknya bisa di-blacklist," katanya.

Tirto mengakui, memang masih ada sekolah yang kondisinya rusak dan belum bisa diperbaiki pada tahun ini karena keterbatasan anggaran. Termasuk sekolah yang rusak cukup parah seperti SDN Katerungan Krian dan SDN Waru 2 yang atapnya sudah ambrol. Namun, Tirto memastikan sekolah yang rusak tersebut akan diperbaiki tahun depan. Survei dan pemetaan kebutuhan perbaikan terhadap sekolah yang rusak itu sudah dilakukan. Tahun depan perbaikan bisa langsung dimulai. (uzl/c6/any)



TARGET KELAR AKHIR TAHUN:
Pekerja menggarap
SDN Bangsri di Kecamatan
Sukodono kemarin.

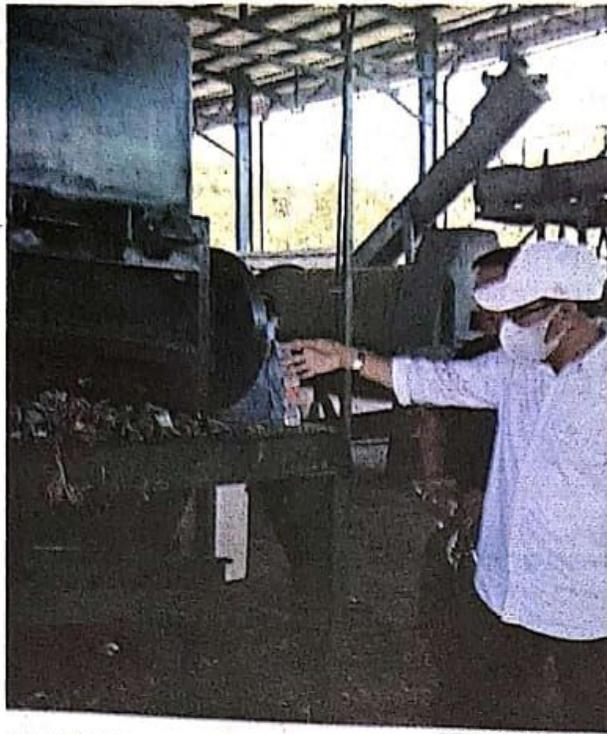
CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



FIRMA ZUHRI ALFALTIWI JAWA POS
CARI ILMU: Tim dari Pemkab Klungkung dan Kabupaten Jembrana, Bali, melihat pemilahan dan pengolahan sampah di TPA Jabon.

Dua Kabupaten di Bali Kepincut Pengolahan Sampah Sidoarjo

SIDOARJO - Proses pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon jadi daya tarik bagi daerah lain. Kemarin (14/9) tim dari Pemkab Klungkung dan Jembrana, Provinsi Bali, datang langsung ke TPA Jabon untuk mengadopsi cara pengolahan sampah.

Ada beberapa hal yang mereka ingin terapkan di Bali. Antara lain terkait proses pemilahan sekaligus cara pengolahan sampah. Mencakup spesifikasi mesin pencacah sampah, mesin pengolah sampah, dan mesin produksi bahan bakar jumpitan padat (BBJP).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung I Ketut Suadnyana menyebut, selama ini masalah pengolahan sampah juga jadi perhatian di kabupatennya. Pihaknya kerap kali berkunjung ke daerah lain untuk bisa mengadopsi cara pengolahan sampah.

Ketika menemukan informasi terkait inovasi penuntasan di Sidoarjo, pihaknya tertarik. Selama ini, inovasi tersebut hanya dia baca dan lihat dari media sosial dan media massa. "Saya tertarik untuk datang langsung, kami ingin terapkan juga di Bali," katanya.

Apalagi, Sidoarjo juga berhasil bekerja sama dengan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Sidoarjo bakal jadi pemasok BBJP sebagai bahan bakar tambahan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PJB. "Jadi, saya tertarik, padahal jumlah sampah Sidoarjo lebih banyak," jelasnya.

Dilihat dari jumlahnya, memang sampah di Kabupaten Klungkung dan Jembrana tidak sebanyak sampah di Sidoarjo. Sampah di Klungkung hanya 90 ton per hari, sedangkan di Jembrana sekitar 168 ton per hari. (uzi/c17/any)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

Mulai Terbitkan dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Tak Perlu Lagi Bawa Fisik KTP

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo mulai mengaktivasi dan menerbitkan identitas kependudukan digital (IKD) di Sidoarjo. Diawali dengan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Kepala Dispendukcapil Reddy Kusuma menyebutkan, langkah tersebut merupakan tahap awal. "Saat ini sudah aktivasi ke 3.000-an ASN. Jumlahnya terus bertambah," katanya. Sebab, proses aktivasi terus dilakukan. Di antaranya, ASN dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo dan Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo. Setelah kepada para pegawai tuntas, proses aktivasi akan berlanjut ke pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Reddy menyebutkan, dengan IKD, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika fisik KTP elektronik tertinggal atau lupa tidak membawa. Bahkan, masyarakat tidak perlu menunjukkan KTP elektronik. Sebab, KTP elektronik sudah tersimpan secara digital. Selain KTP, IKD memuat data identitas diri lainnya. Di antaranya, foto diri, golongan darah, kartu keluarga, tanda tangan elektronik, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu vaksinasi, bahkan data kepemilikan kendaraan.

IKD bisa diunduh di Play Store. Setelah terunduh dan terpasang di *handphone*, pengguna tinggal mengisi identitas diri. Namun, IKD baru bisa digunakan ketika sudah diaktivasi. Nah, aktivasinya harus dilakukan petugas dari dispendukcapil. Dengan demikian, data yang dimasukkan dan tercatat di IKD benar-benar valid.

"Karena harus aktivasi, kami awali dari ASN dulu, baru nanti ke warga," jelas Reddy. Jika pengguna ingin membagikan informasi diri, ada menu berbagi dalam aplikasi IKD tersebut. Ada kode QR jika ingin berbagi informasi diri kepada orang lain. Namun, kode QR hanya berlaku 90 detik dan kode QR yang dibagikan selalu berubah sehingga lebih aman. (uzi/c12/any)

MATA APRIYANTI

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Kabupaten Klungkung Studi Banding Sampah di Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Inovasi pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) Jabon, Kabupaten Sidoarjo menarik bagi sejumlah pemerintah daerah untuk meniru. Di antaranya adalah bagi Pemkab Klungkung dan Jembrana Bali.

Rabu (14/9) sejumlah pejabat dari dua kabupaten di Bali itu juga telah berkunjung ke TPA Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Mereka datang untuk menyaksikan langsung proses pengolahan sampah-sampah di TPA. Termasuk mempelajari mesin beserta spesifikasinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung, I Ketut Suadnyana mengungkapkan, ia sengaja datang jauh-jauh dari Bali karena kepincut dengan inovasi pengolahan sampah. "Ada rekayasa teknologi. Residu yang biasanya tidak bisa di olah, tapi di sini bisa," jelasnya.



Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Klungkung I Ketut Suadnyana (pakai topi putih) berkunjung ke TPA Jabon.

Ia menambahkan, sebelum ke Sidoarjo, pihaknya telah banyak mendapat informasi dari media dan kiriman video terkait pengolahan sampah di Sidoarjo. Karena itu ia bersama pejabat lain penasaran untuk menyaksikan langsung. "Kami

akan amati, tiru, dan modifikasi (ATM) di Bali," terangnya.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia dan Founder Bali Waste Cycle, Putu Ivan Yunatana yang ikut mendampingi rombongan menambahkan, sebagai stakeholder

yang bekerjasama dengan Pemkab Jembrana, ia juga tertarik dengan penggunaan teknologi di TPA Jabon. "Replika yang ada di Sidoarjo akan kami bawa ke Klungkung," urainya.

Ivan menambahkan, pengolahan sampah di Sidoarjo sudah cukup terkenal di antara sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, ia berterima kasih bisa melihat langsung proses dan mesin yang digunakan di TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Masalah sampah di Jembrana maupun Klungkung juga termasuk isu klasik yang butuh penyelesaian. Kalau dari jumlah memang tidak sebanyak di Sidoarjo. Volume sampah harian di Klungkung ada di angka 90 ton, sementara di Jembrana di angka sekitar 168 ton. Kegiatan masyarakat dan jumlah penduduk jadi salah satu faktor yang membedakan besaran volume sampah. (cat/trd)

10 Warga Binaan Lapas Sidoarjo Jadi Kader Kesehatan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Sebanyak sepuluh warga binaan Lapas IIA Sidoarjo dilatih menjadi kader kesehatan Rabu (14/9). Mereka akan dibina dan diseleksi agar menjadi agen kesehatan di lapas yang dipimpin Teguh Pamuji itu.

Kegiatan ini sebagai tonggak awal sebelum mereka benar-benar diterjunkan untuk membantu tim kesehatan lapas yang terletak di jantung Kota Udang itu. Lima orang tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat memberikan pelatihan dan pendampingan teknis.

"Mereka ini akan diseleksi, sebelumnya kami melihat latar belakang dan keahlian yang dimiliki, sehingga bukan sembarang warga binaan bisa mendapat kesempatan menjadi kader kesehatan," cetus Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.

Zaeroji menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas.

Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di lapas, petugas kesehatan dibantu oleh tamping kesehatan. Mereka dipilih oleh petugas serta bekerja secara sukarela untuk membantu peningkatan derajat kesehatan di lapas.??

"Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di lapas, warga binaan dapat diangkat menjadi tamping, tentunya dengan kriteria dan syarat tertentu," terangnya.

Sementara itu, Kalapas Sidoarjo Teguh Pamuji menjelaskan bahwa para tamping yang terpilih setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi. Dia berharap para warga binaan seserius mungkin mengikuti kegiatan pemilihan kader kesehatan ini.

"Kesempatan menjadi tamping ini banyak keuntungannya. Salah satunya berpeluang mendapatkan remisi lebih besar dari warga binaan lain karena dianggap telah berjasa membantu negara dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan lain," jelas Teguh.

Teguh juga menjelaskan bahwa tamping kesehatan itu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu tamping klinik dan kader kesehatan. Tamping klinik adalah akan membantu petugas kesehatan di klinik atau poliklinik lapas. Sedangkan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan petugas kesehatan untuk memberikan motivasi dan penyampaian informasi dalam menjaga kesehatan.

"Tamping klinik nanti lebih banyak berada di klinik lapas, sedangkan kader kesehatan lebih sering berada di blok hunian untuk melakukan penyuluhan kesehatan," pungkasnya. (cat/rd)



Para kader warga binaan ketika mengikuti pelatihan kesehatan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



RUSAK: Kondisi jalan mengalami kerusakan dan lubang diatas jembatan menghubungkan Sidoarjo-Mojokerto serta truk mengalami patas as roda bagian belakang. (gus)

Jalan Krembung Akses Sidoarjo-Mojokerto Dibiarkan Berlubang

Sidoarjo, Memo X

Jalur ekonomi menghubungkan Kabupaten Sidoarjo dengan Kabupaten Mojokerto berada di area PG Krembung, kawasan Desa Krembung, Kecamatan Krembung mengalami kerusakan parah. Selain jalan raya rusak, juga bergelombang, dan belubang. Akibatnya pengguna jalan roda dua, roda empat bahkan truk bertanase berat kesulitan melintas.

Kariadi (48) warga Krembung mengatakan, kerusakan jalan ini sudah sejak lama terjadi. Dan sampai saat ini, tidak ada perbaikan sama sekali. Padahal, akses jalur menuju Mojokerto maupun ke Sidoarjo jarak tempuhnya cukup dekat. Sehingga para sopir memilih melintasi jalan raya Krembung.

Akibat jalan rusak itu sering terjadi kecelakaan, kejadian tidak dapat dihitung dengan jari. Terkadang warga berupaya berusaha melakukan pengurusan, akan tetapi hasilnya tidak maksimal. "Lihat saja kondisi jalannya saat ini, bergelombang, dan berlubang. Selain itu diatas jembatannya juga mengalami lubang yang besar dan lebar," ungkapnya, Rabu (14/09/2022) siang.

Warga berharap kepada instansi terkait di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Sidoarjo segera merealisasikan perbaikan jalan, agar jalur ekonomi kembali dapat dilintasi seperti semula.

Dengan adanya perbaikan pengguna jalan yang melintas tidak lagi merasa kesulitan dan para sopir tidak lagi menanggung kerusakan kendaraan.

Sementara Camat Krembung Dana Riawati melalui Iskandar Kasi Pembangunan menjelaskan kerusakan jalan yang berada di lingkungan PG Krembung di wilayah Desa Krembung, pihaknya sudah melaporkan dan mengajukan permohonan perbaikan, ke instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo. Hal itu berdasarkan laporan dari warga dan Pemerintah Desa.

"Intinya sudah kami laporkan dan terkait perbaikan jalan itu. Hasilnya, kami juga belum tahu kapan direalisasikan. Memang melihat kondisi jalan itu diperlukan peninggian jalan, serta peninggian jembatan agar sampah tidak menumpuk disisi barat jembatan," pungkasnya. (gus/dar)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



BANTUAN: Kades Grabagan, Kamadi, SE. (kanan) mendampingi warganya menerima BLT. (par)

UMKM Warga Desa Grabagan Terima BLT BBM dan BPNT

Sidoarjo, Memo X

Sebanyak 361 warga kurang mampu Desa Grabagan Kecamatan Tulangan cukup bernafas longgar di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Pasalnya mereka menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari kenaikan harga BBM dan BLT dari BPNT (bantuan pangan non tunai). Bantuan dari pemerintah pusat itu diterimakan di Balai Desa Gabagan, Rabu (14/10/2022).

Dana segar yang diterima setiap warga sebesar Rp 500 ribu dengan rincian Rp 300 ribu dari BBM untuk dua bulan dan Rp 200 ribu dari BPNT.

Kepala Desa Grabagan, Kamadi, SE. yakin bahwa penerima bantuan tersebut sudah tepat sasaran karena merujuk pada data dari pusat.

“Saya percaya para penerima BLT ini tepat sasaran, data yang turun pasti telah diverifikasi sehingga tidak ada kecemburuan di masyarakat,” jelasnya.

Melengkapi harapannya, Kades berpesan agar bantuan dana yang diterima dijadikan penguat modal usaha sehingga dengan banyaknya barang dengan harga naik, warga tetap dapat berbelanja untuk usaha tanpa mengurangi porsinya.

“Dana itu jangan untuk belanja yang lain, selain untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan atau usahanya. sehingga warga tetap dapat berjualan atau menjalankan usaha sesuai dengan porsinya. Juga membantu perekonomian warga lain dengan profesi yang berbeda,” harap kades.

Di tempat lain, tercermin auras cerah di wajah ibu Sumini usai menerima BLT. Ibu penjual kue gorengan itu merasa akan terbantu dengan dana segar itu. “Uang ini untuk tambahan modal, harga minyak, tepung, dan bahan lain sedikit naik. Dengan modal tambahan porsi jualan saya nanri tidak akan berkurang,” tutupnya. (par/dar)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

republikatim.com **Pemkab Sidoarjo Sinergi dengan USAID Bangun Sistem Tata Kelola Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Kuat**

apaMgkdr
4.9.2022



LOKAKARYA - Lokakarya Peningkatan Pelayanan Publik 2 hari mulai tanggal 13-14 September 2022 diikuti 105 peserta ASN perwakilan OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RSUD Sidoarjo dan Sidoarjo Barat di Hotel Swiss Bell Inn, Malang, Selasa (13/09/2022).

Sidoarjo (republikatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus berbenah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Hal ini karena Pemkab Sidoarjo berkomitmen menjaga dan meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Seperti dengan menggelar Lokakarya Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo di Hotel Swiss Bell Inn, Malang, Selasa (13/09/2022) serta Lokakarya digelar selama dua hari mulai tanggal 13-14 September 2022 ini diikuti 105 peserta ASN perwakilan OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas serta RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat.

Kegiatan yang diinisiasi Pemkab Sidoarjo lewat Bagian Organisasi ini menggali sinergi organisasi internasional Amerika USAID lewat programnya, USAID Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat atau yang disingkat ERAT.

Lokakarya peningkatan kinerja pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Asasel II (Administrasi Umum) Setkabid Sidoarjo, Ahmad Zaki.

Ahmad Zaki mengatakan pelayanan publik di Pemkab Sidoarjo secara umum baik dan sudah diakui pemerintah pusat. Namun, pihaknya merasa itu tidak merupakan ASN bangsa ini. Pelayanan publik yang prima harus selalu dikedatkan kepada masyarakat.

"Pelayanan publik di Sidoarjo sudah bagus dan sudah prima. Tapi kita harus terus berinovasi dan tidak boleh berpuas diri dengan capaian ini," ujar mantan Sekda Sidoarjo, Ahmad Zaki kepada republikatim.com, Selasa (13/09/2022) sore.



Zaki berharap sejumlah inovasi pelayanan publik ditularkan para ASN dengan produktif. "Yang dengan terus mengembangkan inovasi, pastinya meyakini standar pelayanan publik di Sidoarjo semakin meningkat. Standar pelayanan publik prima yang diminta Kementerian RB serta pelayanan publik berupa zona hijau seperti yang diharapkan Embudharian untuk bisa hadir di tingkat-tingkat masyarakat."

"Cari inovasi lain agar pelayanan publik kita semakin meningkat. Harus ada inovasi dan keunikan lain. Yang jadi penggerak dari kabupaten lain dan terus selalu ada penyediaan terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Sementara Koordinator Provincial USAID ERAT, Dina Umanto mengatakan program kerja sama USAID ERAT sebagai upaya untuk membekali dan memantapkan para kelola pemerintah daerah. Lewat kegiatan seperti ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

"Untuk itu, kami meminta dukungan semua pihak agar pelayanan publik meningkat. Mari bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di unit kerja kita masing-masing," tegasnya.



Dina berharap melalui lokakarya seperti ini akan memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan semua tingkatan pemerintahan. Selain itu, akan diperoleh informasi untuk memantapkan pelayanan publik yang efektif.

"Kegiatan ini bisa menjadi pencerahan dan perbaikan terhadap peningkatan pemenuhan standar pelayanan publik. Selain itu, meningkatkan penilaian kepatuhan terhadap pemenuhan standar pelayanan publik," tandasnya.

Dalam lokakarya ini menghadirkan anggota DPRD Sidoarjo, M Darmasari Chudori (Fraksi PKB) dan Dany Haryanto (Fraksi PKS) serta Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Dr Ramliyanto sebagai narasumber. HotWhee





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO



kharismanews.id

KPK Kawal Kerjasama Pemkab Sidoarjo dengan PJB Kelola Sampah Untuk Co Firing PLTU

Media online Kharismanews.id

45 menit



Sidoarjo, Kharismanews.Id – Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat untuk Co Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap diteken Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Direktur Operasi 2 PT. PJB Rachmanoe Indarto. Selasa, (13/9/2022) di Kantor Pusat PT. PJB, Ketintang Surabaya.

Penandatanganan MoU disaksikan Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan, Komisaris Independen PT. PLN Persero, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Mega Proyek Energi Terbarukan PT. PLN Persero William Kusdiharto, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko.

Deputi KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, institusinya memiliki kepentingan dalam mengawal kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemda dan PT. PJB. Kepentingannya kata Pahala Nainggolan, yaitu menjaga uang pemda agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan sampah.

Ia mendukung pelaksanaan MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan PT. PJB. Menurut Pahala, secara perhitungan kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Pemda bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan APBD untuk mengatasi masalah sampahnya. Karena sampah yang ada sekarang bisa diolah dijadikan campuran bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kemudian dijual ke PT. PJB. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT. PJB bisa efisiensi pembelian bahan bakar batu bara.

Pahala juga menjelaskan, kerjasama tersebut harus dipahami Pemda bahwa tujuannya bukan untuk mencari pendapatan, tetapi problem sampah bisa terselesaikan dengan ramah lingkungan.

"Tujuan utama tidak mencari pendapatan tetapi menyelesaikan masalah sampah di daerah," ujar Pahala.

KPK juga tengah mengajukan perubahan Perpres Nomor 35 tahun 2018 tentang pemanfaatan sampah yang diubah menjadi energi listrik. Menurut Nainggolan, perpres tersebut sekarang dalam proses perubahan dan sudah diajukan KPK ke Presiden Joko Widodo. Perubahannya yakni, pemanfaatan sampah diolah terlebih dulu menjadi energi terbarukan selanjutnya bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai energi listrik. Salah satunya bisa untuk co firing PLTU yang dilakukan PT. PJB sekarang.

"Saya harap setelah MoU ini segera dilanjutkan ketingkat selanjutnya, jangan sampai berhenti di MoU saja. Kewajiban pemda menyiapkan lahan dan mengolah sampah menjadi RDF kemudian dimanfaatkan PJB untuk bahan bakar PLTU," tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan, pada prinsipnya Pemkab Sidoarjo setuju sepenuhnya kerjasama pengelolaan sampah dengan PT. PJB.

Ia juga menyampaikan, kapasitas pengolahan sampah di TPA Jabon yang memiliki luas 14 hektar saat ini perhari mampu memproduksi 15 ton jumputan padat atau RDF.

Gus Muhdlor berharap kerjasama segera bisa dilakukan setelah penandatanganan MoU, karena saat ini ia sedang menyiapkan BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah) yang mengelola sampah di TPA Jabon. Upaya itu dilakukan agar proses kerjasama dan penanganan sampah yang ada di TPA Jabon bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi jumputan padat.

"Prinsipnya kami siap mendukung secara regulasi dan kebijakan, kita juga sedang menyiapkan BLUD TPA Jabon, untuk kapasitas produksi nanti kita upayakan naik lagi, sekarang kemampuan produksi 15 ton perhari," ujarnya.

Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan mengungkapkan, kebutuhan jumputan padat untuk co firing perhari 100 ton. Ia berharap kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dari sampah olahan Pemkab Sidoarjo, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Tuban.

Sebelumnya, jumputan padat yang dihasilkan TPA Jabon sudah diuji cobakan di PLTU Awar-Awar dan PLTU Paiton sebanyak 60 ton. Hasil dari ujicoba itu secara umum sudah layak untuk dijadikan campuran bahan bakar batu bara atau co firing.

"PJB bersama Pemkab Sidoarjo mengirim 60 ton untuk ujicoba di PLTU awar-awar dan Paiton. Kebutuhan maksimum 3 persen pemanfaatan sampah olahan," terangnya.

"Setelah ini bisa dilanjutkan kerjasama dengan Tuban, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo," pungkasnya. (Sund/rl)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO



sinarpos.co.id

Polresta Sidoarjo Bersama Alumni Untag Bagikan Bansos Dampak Kenaikan Harga BBM

Admin

2-3 menit



Sidoarjo, Sinar Pos-Dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat kurang mampu, mengundang kepedulian Polresta Sidoarjo bersama Alumni Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya. Kedua pihak turun bersama membagikan bantuan sosial (bansos) paket sembako ke masyarakat.

Ada sekitar 300 paket sembako yang dibagikan Polresta Sidoarjo bersama Alumni Untag Surabaya, kali ini yang dituju adalah masyarakat di Kelurahan Lemahputro, Sidoarjo, pada Rabu (14/9/2022) sore.

Kapolresta Sidoarjo Komisaris Besar Polisi Kusumo Wahyu Bintoro turut turun langsung membagikan bansos ke warga Lemahputro. Ia mengatakan, pihaknya dengan terbuka bersama komunitas atau pihak lainnya untuk selalu menebar kebaikan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Adanya kenaikan harga BBM di sisi lain ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Sehingga kami dari Polresta Sidoarjo, Polsek jajaran, Pemkab Sidoarjo dan kali ini bersama Paguyuban Alumni Untag Surabaya turun bersama membantu meringankan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM," jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Ia menambahkan, Polresta Sidoarjo bersama pihak terkait akan terus masuk ke wilayah-wilayah untuk membantu masyarakat, yang terdampak dan benar membutuhkan bantuan sosial.

Sementara Sekjen Paguyuban Alumni Untag Surabaya Nucky Adi Nugroho menjelaskan, upaya yang dilakukannya merupakan wujud kepedulian sejumlah lulusan kampusnya pada masyarakat. "Kami berupaya maksimal untuk selalu hadir bagi masyarakat, sama halnya dengan kepedulian kepolisian kita. Saling peduli untuk sesama, mudah hadir untuk menebar kebaikan," katanya.

Terkait adanya bansos paket sembako di wilayah Lemahputro, lurah setempat Akhmad Hariyadi mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari Polresta Sidoarjo dan Alumni Untag Surabaya maupun pihak-pihak lain, kepada warga Lemahputro yang terdampak kenaikan harga BBM. "Semoga bantuan ini bermanfaat untuk semuanya," imbuhnya. (Awi)

